

Legalisasi Aborsi: Suatu Refleksi Terhadap Undang- Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009

**Nurhayani
Dosen FKM Unhas**

Aborsi atau abortus merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak bagi kesakitan dan kematian. Penyebab dari kematian ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan, infeksi dan eklampsia. Secara statistik frekuensi terjadinya aborsi di Indonesia sangat sulit dihitung secara akurat karena aborsi buatan sangat sering terjadi, tanpa dilaporkan kecuali tanpa terjadi komplikasi.

Sampai saat ini aborsi masih merupakan masalah kontroversial di masyarakat. Di satu pihak aborsi dianggap ilegal dan dilarang oleh agama sehingga masyarakat cenderung menyembunyikan kejadian aborsi. Di lain pihak aborsi terjadi di masyarakat terbukti dari berita dan media massa maupun media elektronik. Sebuah penelitian yang dilakukan di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia ditemukan bahwa insiden aborsi lebih tinggi terjadi di perkotaan di bandingkan di pedesaan.

Ada beberapa sebab terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (unwated pregnancy) sehingga ingin digugurkan yakni tidak mengetahui bahwa perilaku seks yang dilakukannya akan mengakibatkan kehamilan terutama menggunakan alat kontrasepsi , menggunakan alat kontrasepsi tetapi gagal. Hamil akibat pemerkosaan , ada cacat berat pada janin yang dikandungnya, serta Kesehatan ibu yang tidak memungkinkan baginya untuk meneruskan kehamilannya.

Indikasi abortus provocatus therapeuticus ini dapat berubah-ubah sesuai perkembangan ilmu kedokteran. Beberapa penyakit ibu yang saat ini diperkenankan sebagai indikasi abortus provocatus therapeuticus adalah dekompensasi kordis ,glomerulonefritis, sindroma nefrotik, karsinoma rekti yang harus diradioterapi. Sedangkan radio hipertensi, tuberculosis tidak lagi dapat dijadikan indikasi intuk melakukan abortus.

Suatu reformasi hukum Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UUK) berkaitan dengan aborsi yang menetapkan 2 alasan utama aborsi diperkenankan yang selama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan indikasi medik.

Pasal 75 UUK (1) menyebutkan larangan melakukan aborsi (2) Larangan dikecualikan (a)Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam jiwa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yg tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan (b) Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. (3) Tindakan ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan oleh konselor.

PsI 76 Aborsi hanya dapat dilakukan a) Sebelum kehamilan berusia 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. b) Tenaga Kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan menteri.c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan d) Dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan.e) Penyedia pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Peraturan hukum abortus seharusnya semakin maju sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi kedokteran. Perangkat hukum pidana bukan satu-satunya alat untuk memecahkan problem sosial , walaupun hukum pidana ‘diserahi tugas’ untuk menanggulangi kejahatan. Sebab dalam masyarakat tidak jarang ditemui perbuatan orang yang dikategorikan kejahatan, namun belum mampu mendeskripsikan dengan baik, karena itu akan lebih baik ditanggulangi secara sinergik dengan tatanan sosial lainnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan aborsi mulai dari Pasal 283 KUHP, 299 KUHP, 346 KUHP, 347 KUHP, dan Pasal 348 KUHP. Pidana dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian jika kejahatan dilakukan seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam Pasal 347 KUHP, 348 KUHP serta Pasal 349 KUHP.

Kasus perempuan yang hamil akibat pemerkosaan perlu diapresiasi yang mendalam kepada pembuat undang-undang kesehatan karena telah dijadikan alasan aborsi atas dasar indikasi sosial. Kejahatan pemerkosaan akan selalu menjadi pengalaman traumatis bagi jiwa korban diperkosa seumur hidupnya. Kehamilan akibat pemerkosaan menjadi beban psikologis yang lebih hebat bagi perempuan baik selama masa kehamilannya maupun dalam masalah pengurusan anaknya kelak.